



ALUN-ALUN EMPANG BOGOR: DINAMIKA TATA RUANG PEMERINTAHAN TRADISIONAL BOGOR PADA MASA KOLONIAL

Flourentina Dwiindah Pusparini^{1(*)}

¹Universitas Mpu Tantular, Jakarta

Abstract

Bogor, during the colonial period, had a traditional government center in the form of an alun-alun, known as Alun-Alun Empang. This study aims to explore the dynamics of the development of the alun-alun, including what factors are behind its appearance, how the process was formed, and what its functions were in the colonial era. The study used the historical method. The primary sources used were maps of De Haan (1798, 1821, and 1830), the city maps of Buitenzorg (1901, 1921, 1930, and 1946), and literature related to alun-alun. The results showed that in the pre-colonial period (VOC), the traditional government center of Kampung Baru in Sukahati still applied Javanese cosmology; this can be seen in the orientation of the regent's house and the pool (empang in Sundanese) that stretches north-south with an imaginary axis towards the sea at the top and towards Mount Salak in the south. After the planning of the capital city of Buitenzorg in the 19th century, the Dutch East Indies colonial government built a square-shaped alun-alun with macapat concept in front of the regent's house. In addition to its role as a symbol of colonial power and a place for people to gather, alun-alun also developed into a center of economic, cultural and religious activity due to the impact of Wijkenstelsel in 1835-1915.

Kata Kunci: Alun-alun, Buitenzorg, Kolonial, Empang, Wijkenstelsel

Juli - Desember 2022, Vol 2 (2) : hlm 11-22
©2022 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
All rights reserved.

(*) Korespondensi: flourentina@gmail.com (Flourentina Dwiindah Pusparini)

PENDAHULUAN

Alun-alun merupakan salah satu elemen tata kota bersejarah yang diwariskan sejak masa kerajaan Hindu di nusantara. Di dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca bertahun Saka 1287 (1365 Masehi) mengindikasikan bahwa alun-alun merupakan tanah lapang yang bermakna sakral, simbol kekuasaan raja di keraton Majapahit. Saat kerajaan-kerajaan Islam di Jawa berdiri pada abad 15-16 M, alun-alun di pusat pemerintahan kerajaan masih mengadopsi konsep kosmologi Jawa dengan penyesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Pola ruang pada pusat kekuasaan menerapkan konsep *Macapat*. *Macapat* yang berasal dari kata *maca* = beda dan *papat* = empat, yang memiliki arti bahwa lokasi-lokasi penting dalam aktivitas masyarakat diatur dalam empat penjuru mata angin, alun-alun adalah pusatnya. Alun-alun pada masa prakolonial menunjukkan wujud keselarasan antara alam dunia manusia (mikrokosmos) dan jagat raya (makrokosmos) (Handinoto, 1992). Santoso (2008) mengungkapkan bahwa alun-alun di Jawa tidak hanya memiliki aspek kosmos, tetapi juga kultur dan kuasa. Sejak dahulu secara fisik bentuk alun-alun tidak banyak berubah namun latar belakang berupa konsep kosmos, kultur dan kekuasaan yang akan menentukan bagaimana fungsi alun-alun dalam suatu kota.

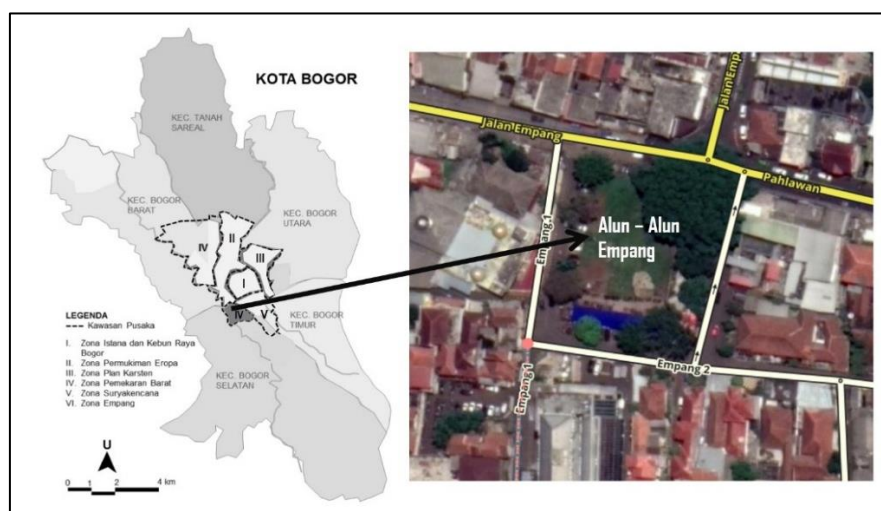
Era prakolonial Hindia Belanda di Jawa Barat khususnya wilayah Bogor, dimulai sejak VOC berhasil mengambil tanah Priangan dari kerajaan Mataram pada tahun 1677. Sejak tanaman kopi dikenalkan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-17, Belanda berambisi untuk memperluas penanaman kopi di daerah pedalaman yang berada di selatan Batavia. Ruang kota berupa alun-alun dalam perjalanan panjang sejarah Kota Bogor sebenarnya sudah ada sejak abad ke-15 yaitu pada saat wilayah Bogor menjadi ibukota Kerajaan Pajajaran hingga keruntuhannya pada tahun 1579. Keberadaan tanah lapang yang diindikasikan sebagai alun-alun luar ibukota Pakuan Pajajaran dilaporkan dalam ekspedisi VOC ketika memetakan wilayah hulu Sungai Ciliwung. Wilayah ibukota kerajaan Pajajaran diperkirakan membujur memanjang arah utara-selatan diantara Sungai Ciliwung dan Cisadane serta memiliki dua alun-alun, yaitu alun-alun dalam (dekat keraton) dan alun-alun luar. Di atas bekas alun-alun luar inilah Alun-alun Empang saat ini berdiri (Danasasmita, 2022).

Kota Bogor sebagaimana kota-kota kolonial di pedalaman pulau Jawa, juga tumbuh menjadi kota modern pada masa kolonialisasi Belanda (1800–1942). Masa ini dicirikan oleh adanya perencanaan pembangunan wilayah kota dengan berbagai kelengkapannya (Wihardyanto & Ikaputra, 2019). Kedatangan VOC disusul dengan era kolonialisasi Hindia Belanda membuat fungsi alun-alun disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan kolonial. Dalam beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna alun-alun di kota dan kabupaten yang dikuasai pemerintahan Belanda sebelum era kolonial dan saat terjadinya kolonialisme (Indrianingrum et al., 2015), (Falah et al., 2019). Perbedaan yang ditemukan pada kehadiran alun-alun antara masa prakolonial dan masa kolonial adalah makna sakral alun-alun semakin melentur dan hilang. Alun-alun pada masa sebelumnya memiliki simbol kekuasaan penguasa, secara perlahan memudar dengan

semakin terbukanya alun-alun sebagai tempat yang digunakan rakyat untuk melakukan berbagai aktivitas. Hal ini menarik untuk ditelusuri apakah pada Alun-Alun Empang juga mengalami perubahan yang serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri seperti apa alun-alun pada masa kolonial, termasuk faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kemunculan alun-alun serta bagaimana proses perkembangan alun-alun sebagai pusat pemerintahan tradisional di wilayah Bogor pada masa kolonial.

METODE

Obyek studi dalam penelitian ini adalah Alun – Alun Empang Kota Bogor yang terletak di Jl. Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (Gambar 1). Alun-alun Empang tercatat sebagai obyek Cagar Budaya Bogor yang berada di subkawasan Empang dalam Program Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Bogor. Pemilihan obyek studi didasarkan pada nilai kesejarahan yang dimiliki oleh Alun-Alun Empang dalam perkembangan Kota Bogor.



Sumber: diolah dari peta kawasan pusaka P3KP Kota Bogor, 2015 dan citra Google Maps, 2022

Gambar 1. Lokasi Alun-Alun Empang Kota Bogor

Penelitian untuk mengungkap perkembangan Alun-Alun Empang pada masa kolonial dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Metode ini dilakukan dalam empat tahapan: *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*.

1. *Heuristik* yaitu tahap pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan dengan studi kepustakaan. Data didapatkan dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang dipakai adalah peta De Haan (tahun 1798, 1821, 1830, dan 1930), peta kota Buitenzorg (tahun 1901, 1921, 1930, dan 1946). Sumber sekunder adalah literatur yang ditulis oleh peneliti terkait sejarah Priangan dan alun-alun.
2. *Kritik* sumber yaitu tahap untuk mendapatkan kebenaran data sehingga sumber tersebut layak digunakan sebagai dasar penulisan.

3. *Interpretasi*, yaitu tahapan pemberian makna dan penafsiran yang jelas terhadap data
4. *Historiografi* adalah tahap terakhir berupa proses merangkai fakta-fakta yang berhasil dihimpun untuk menuliskan sebuah kisah sejarah.

Perkembangan Alun-Alun Empang sejak era VOC hingga akhir tahun 1942 disajikan dalam beberapa periode bertujuan supaya dapat menjelaskan kronologi perkembangan ruang alun-alun yang runtut selama masa kolonial. Penambahan literatur dari aspek sejarah dan antropologi dalam pembahasan berfungsi untuk mendapatkan sudut pandang tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kemunculan alun-alun serta bagaimana proses berkembangnya alun-alun sebagai pusat pemerintahan tradisional di wilayah Bogor pada masa kolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

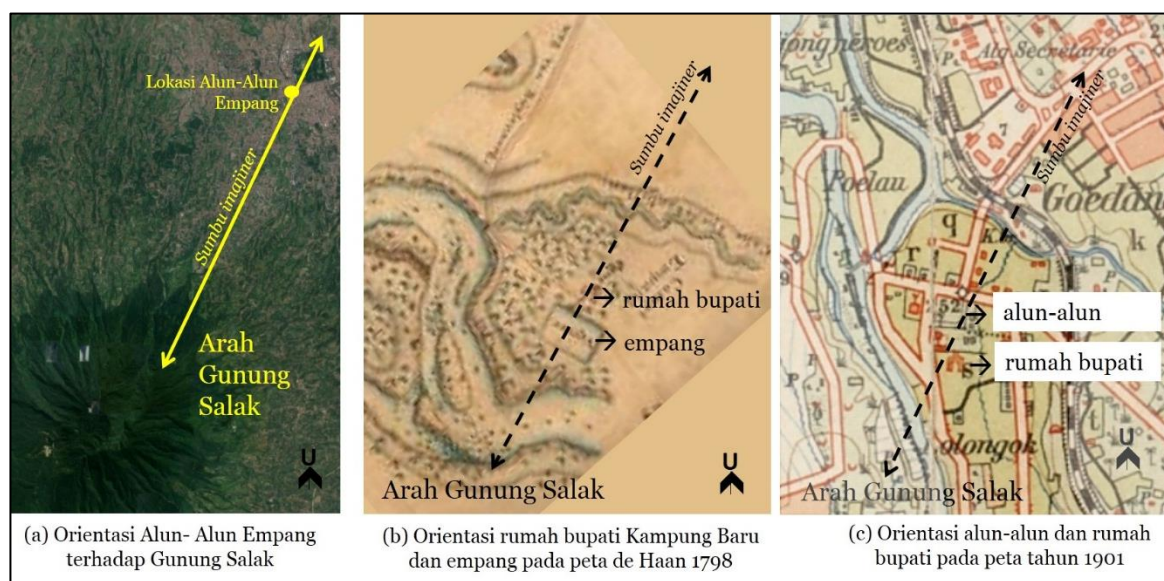
Periode Prakolonial VOC (1677 – 1799)

Sejak tahun 1677, wilayah selatan Batavia hingga dataran tinggi Priangan telah dikuasai VOC sebagai wilayah potensial untuk memperluas perkebunan kopi (Breman, 2014). Awal abad ke-18, tanaman kopi tumbuh dengan baik di daerah-daerah pedalaman Hindia Belanda hingga menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan di pasar Eropa. Untuk keperluan peninjauan wilayah perkebunan Priangan, para gubernur jenderal sering melakukan perjalanan dari Batavia ke dataran tinggi di hulu sungai Ciliwung. Wilayah di selatan Batavia ini kemudian disebut dengan nama *Buitenzorg*, yang artinya tanpa kesibukan.

Gubernur Jenderal Van Imhoff mulai membentuk pusat pemerintahan kabupaten di wilayah *Buitenzorg* setelah menggabungkan sembilan buah kampung yang ada di hulu Sungai Ciliwung dengan nama *Regentschap* Kampong Baroe atau Kabupaten Kampung Baru tahun 1745. Tanujiwa seorang letnan berdarah Sunda yang ikut dalam ekspedisi VOC dianggap berjasa dalam membuka kampung-kampung di selatan Batavia. Ia diangkat sebagai Demang Kampung Baru (Kampong Baroe) pertama dan berkuasa selama 6 tahun (1689-1705). Kepemimpinan wilayah Kampung Baru secara berturut-turut digantikan oleh keturunannya yaitu: R.Dmg. Martakara (1706-1718), R.Dmg. Martawangsa (1718-1741), dan R.Dmg. Martawirya (1741-1749). Pada masa pemerintahan bupati ke-5 yaitu R.Dmg Tumenggung Wiradinata (1749-1754), pusat pemerintahan kabupaten pindah ke Kampung Sukahati pada tahun 1754 (de Haan, 1912). Perpindahan ini diindikasikan tidak hanya karena melimpahnya sumber air dari Sungai Cisadane, kesuburan tanah dan keindahan alam di Sukahati, tetapi juga supaya lebih dekat dengan bekas wilayah alun-alun luar ibukota Kerajaan Pajajaran. Kejayaan ibukota kerajaan Pajajaran masih melekat kuat dalam ingatan masyarakat Sunda.

Pusat pemerintahan tradisional Kampung Baru pada periode prakolonial masih menerapkan aspek kosmologi Jawa, hal ini terlihat pada orientasi rumah bupati dan elemen kolam yang membujur utara-selatan dengan sumbu imajiner ke arah

gunung. Posisi rumah bupati dan empang berjajar menghadap laut di utara dan membelakangi Gunung Salak di selatan (Gambar 2). Pada periode prakolonial ini belum terlihat dengan jelas adanya ruang terbuka berbentuk alun-alun dengan konsep macapat seperti pada pemerintahan tradisional di Jawa pada umumnya. Jika dikaitkan dengan konsep kosmos, rumah bupati Kampung Baru adalah miniatur keraton (makrokosmos) yang memiliki kekuasaan besar di pusat pemerintahannya. Alun-alun yang bersifat sakral pada umumnya berada di bagian terluar wilayah yang dibatasi pagar. Jika pada masa lalu batas utara ibukota Pakuan Kerajaan Pajajaran adalah alun-alun luar yang dibatasi oleh tebing sungai, sedangkan rumah bupati berdiri di atas bekas alun-alun luar ibukota (Danasasmita, 2022), dapat ditarik hubungan bahwa tanah di halaman depan rumah bupati yang ditanami pepohonan sebenarnya adalah alun-alun juga dari masa kerajaan Pajajaran.



Sumber: (a) diolah dari citra Google Maps, 2022 (b) peta kanal baru (peta De Haan 1798) pada situs <https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id> dan (c) peta Buitenzorg tahun 1901 <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Gambar 2. Perbandingan orientasi rumah bupati Kampung Baru tahun 1798 (prakolonial) dengan Alun-Alun Empang tahun 1901 (kolonial)

Berdasarkan lukisan Rach tahun 1772, kediaman bupati Kampung Baru berada di dataran yang dipisahkan oleh tebing sungai Cipakancilan dan dilindungi oleh dinding tinggi dari kayu dan anyaman bambu. Tebing sungai ini berfungsi sebagai benteng alam. Elemen pertahanan berupa pagar tinggi dan tebing sungai, menjadi batas antara kediaman bupati dengan daerah sekitarnya. Wilayah yang ada di dalam benteng selain menunjukkan area kekuasaan bupati yang bersifat sakral, juga merupakan ciri khas pusat kekuasaan sebelum tahun 1800, yaitu mempertimbangkan keamanan sebagai aspek penting kekuasaan (Wihardyanto & Ikaputra, 2019). Pada periode prakolonial, tata ruang pemerintahan tradisional Kampung Baru sangat dipengaruhi oleh kebijakan VOC dalam aspek pertanian. Tahun 1757 dibangun kanal baru yang membagi aliran Sungai Cisadane di dekat kediaman bupati. Kanal ini

difungsikan untuk kebutuhan pengairan lahan pertanian dan perkebunan di Buitenzorg. Rumah-rumah di kiri kediaman bupati diindikasikan sebagai gudang-gudang kopi (Bremen, 2014). Gudang-gudang tersebut adalah wujud kekuasaan kolonial terkait kewajiban rakyat untuk menanam kopi. Bupati pada periode ini bertugas mengumpulkan dan menyetorkan hasil panen kopi rakyat ke VOC. Bupati yang diangkat pada periode prakolonial walaupun mendapat hak untuk menguasai wilayah, tetapi tetap menjadi alat kekuasaan VOC dan Pemerintah kolonial Belanda untuk mengerahkan tenaga rakyat dan mengeksploitasi hasil bumi di Hindia Belanda (Hardjasaputra et al., 2022).



Sumber: *Gezicht op Soek Atie of Hartenlust bij Buitenzorg* oleh Rach 1772 <https://www.atlasofmutualheritage.nl>

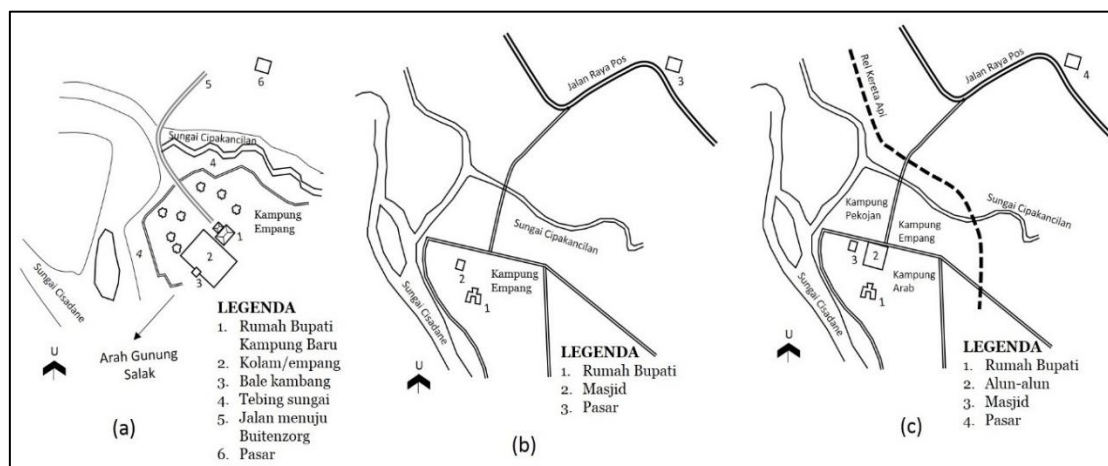
Gambar 3. Kediaman bupati Kampung Baru di Sukahati dalam lukisan Rach (1772)

Keberadaan kolam atau empang dan bangunan bale kambang di kediaman bupati Priangan (de Haan, 1912) adalah elemen yang menjadi ciri khas pola ruang di pusat pemerintahan kabupaten di Priangan. Empang di selatan kediaman bupati juga ditemukan di pusat pemerintahan Bandung dan Sumedang. Di Bandung, wilayah yang dahulu berupa kolam besar telah hilang, saat ini menjadi kelurahan bernama Balong Gede (Bachtiar, 2020). Sedangkan di Kabupaten Sumedang, keberadaan empang masih lestari, letaknya berada di bagian selatan rumah bupati yang sekarang bernama Gedung Negara (Ahmad, 2021). Adanya kemiripan pola di pusat pemerintahan tradisional di Jawa Barat ini dilatarbelakangi oleh kultur budaya yang sama. Sumedang pada abad ke-16 merupakan wilayah Priangan Timur tempat berdirinya Kerajaan Sumedang Larang (1578-1620). Kerajaan Sumedang Larang dianggap sebagai penerus kerajaan Sunda setelah ibukota Pakuan Pajajaran di wilayah Bogor runtuh tahun 1579 (Thresnawaty, 2011).

Periode Kolonial Perancis – Inggris (1800 – 1816)

Babak baru periode kolonialisasi pada tahun 1800 ditandai dengan peralihan kekuasaan atas Hindia Belanda dari VOC kepada pemerintah Belanda. VOC

dibubarkan pada 31 Desember 1799 setelah resmi dinyatakan bangkrut. Ketika Belanda dikuasai Perancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte (1800), ia mengirim Gubernur Jenderal Daendels untuk membenahi administrasi di Hindia Belanda. Sejarah penting di wilayah Priangan pada masa kepemimpinan Daendels adalah pembangunan Jalan Raya Pos dari Buitenzorg ke Cisarua dan Sumedang, serta menghubungkan jalan-jalan yang sudah ada sebelumnya di kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur (1808-1811). Ketika Hindia Belanda dikuasai Inggris dari tahun 1811 Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles menggantikan kekuasaan Daendels hingga tahun 1816. Selama Daendels dan Raffles berkuasa, bupati tidak lagi memegang kekuasaan daerah namun sebagai pegawai pemerintahan yang mengurus kewajiban rakyat di wilayah tempat kerjanya. Pada era ini tidak ditemukan bukti perubahan pola ruang di pusat pemerintahan bupati Kampung Baru dari masa sebelumnya kecuali keberadaan Jalan Raya Pos di utara (Gambar 4). Jalan ini selain berfungsi sebagai jalur mobilisasi militer tetapi juga jalur mobilisasi hasil pertanian dari wilayah Priangan ke Batavia.



Sumber: Analisis penulis,2022

Gambar 4. Perubahan pola ruang pusat pemerintahan tradisional di Bogor: (a) prakolonial tahun 1772-1798, (b) kolonial tahun 1800 –1821, dan (c) kolonial tahun 1830-1942

Periode Karesidenan Buitenzorg (1816 – 1904)

Pada tahun 1816, wilayah Hindia Belanda kembali dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Sebelum kekuasaan Gubernur Jenderal Raffles berakhir, wilayah Priangan (*Preangerlanden*) diubah menjadi Karesidenan Priangan (*Preanger Regentshappen*). Pembentukan Karesidenan Priangan disusul dengan pembentukan karesidenan lain termasuk Karesidenan Buitenzorg. Gubernur Jendral van der Capellen yang memerintah tahun 1816–1826 mengangkat kembali bupati dari status pegawai menjadi kepala daerah. Bupati kembali memiliki kedudukan kekuasaan di bawah asisten residen. Kebijakan ini didasarkan atas peranan bupati yang masih penting dalam keberhasilan pemerintah kolonial setelah dibangunnya Jalan Raya Pos (Lasmiyati, 2015). Setelah Karesidenan Buitenzorg berdiri, pemerintah kolonial membuat perencanaan ibukota Buitenzorg di awal abad ke 19 yang dibuktikan dengan

adanya peta ibukota Buitenzorg tahun 1821 dan 1830. Dalam perencanaan ini, Jalan Raya Pos dijadikan sebagai garis sumbu ibukota, didukung dengan keberadaan Istana Buitenzorg dan *Land's plantetuin* (Kebun Raya Buitenzorg) yang diresmikan tahun 1817. Dalam perencanaan ibukota, secara perlahan sudah terlihat adanya pemisahan pemerintahan modern (asisten residen) di bagian utara dan pemerintahan tradisional (bupati) di bagian selatan.

Pusat pemerintahan tradisional di era kolonial terbentuk secara bertahap dengan ditandai berdirinya masjid di dekat rumah bupati tahun 1817. Pada peta tahun 1821, sudah terdapat infrastruktur jalan di Kampung Empang, namun kolam atau empang di dekat kediaman bupati sudah tidak ada. Pada peta tahun 1830, muncul alun-alun dengan bentuk persegi dengan batas jalan di bagian utara dan barat sebagai pelengkap pola ruang yang sudah ada sebelumnya (Gambar 5). Alun-alun yang didirikan di pusat pemerintahan tradisional ini mengadopsi konsep *macapat* seperti pusat pemerintahan kabupaten di Jawa pada umumnya. Lokasi-lokasi penting dalam aktivitas masyarakat diatur dalam empat penjuru mata angin, alun-alun diposisikan di tengah, rumah bupati di bagian selatan, masjid di bagian barat, dan pasar di utara. Lokasi pasar tidak langsung berhadapan dengan alun – alun dikarenakan faktor topografi dan sejarah pasar Buitenzorg yang berdiri lebih awal yaitu di abad ke-18.



Sumber: (a) Peta de Haan tahun 1821 <https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id> dan (b) Peta De Haan tahun 1830 <https://www.sejarah-nusantara.anri.go.id>

Gambar 5. Perubahan Kampung Empang (a) Tahun 1821 sudah dilengkapi infrastruktur jalan (b) Tahun 1830 telah muncul alun-alun

Alun-alun di pusat pemerintahan bupati pada periode ini sesungguhnya merupakan wujud sistem pemerintahan tidak langsung yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bupati sebagai penguasa rakyat. Alun-alun difungsikan sebagai tempat berkumpulnya rakyat ketika ada pengumuman dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pohon karet kebo dan pohon beringin yang ada di tepi alun-alun menjadi lokasi tempat bernaung para pembawa berita (Gambar 6). Handinoto (1992) menyebutkan bahwa pemerintah kolonial memanfaatkan elemen fisik pemerintahan tradisional yaitu alun-alun dalam mengembangkan sistem

pemerintahan tidak langsung. Dengan demikian makna alun-alun yang mengadopsi konsep macapat pada abad ke-19 bukan lagi murni bersifat sakral sebagaimana pada periode prakolonial namun fungsinya telah bergeser disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan kolonial.

Segregasi sosial di ibukota Buitenzorg dipertegas ketika diberlakukannya zona permukiman berdasarkan etnis (*wijkenstelsel*) pada tahun 1835. Wilayah utara di sekitar Jalan Raya Pos dan Istana hanya diperuntukkan bagi permukiman orang-orang Eropa, sedangkan permukiman rakyat pribumi dan pendatang dari Arab, Hadramaut dan India yang beragama Islam dibatasi hanya boleh bermukim di daerah Kampung Empang dan sekitarnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Kampung Empang di abad ke-19. Wilayah ini menjadi tujuan bermukim orang-orang yang bermigrasi dari Arab, Hadramaut (Yaman) dan India, baik untuk tujuan berdagang maupun dalam rangka dakwah Islam. Masing-masing tokoh pendatang dari Arab dan Hadramaut mendirikan masjid untuk komunitasnya, yaitu Masjid An-Nur Al Attas berdiri tahun 1828 dan masjid At-Taqwa Pekojan berdiri awal 1900an. Lukisan R. Toelaer tahun 1847 dan foto suasana sekitar alun-alun tahun 1880 (Gambar 6) menunjukkan bahwa alun-alun di depan rumah bupati pada masa *wijkenstetel* ternyata tidak hanya berfungsi sebagai simbol pemerintahan bupati, namun juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, budaya dan keagamaan. Keberadaan kampung Empang, kampung Arab serta kampung Pekojan merupakan hasil adaptasi dan akulturasi 3 budaya dalam memanfaatkan ruang di pusat pemerintahan tradisional.



Sumber: (a) Lukisan R.Toelaer tahun 1847 <https://geheugen.delpher.nl> (b) Alun-alun di Buitenzorg tahun 1880 <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Gambar 6. Situasi alun-alun dan aktivitas yang terjadi di dalamnya

Periode Gemeente Buitenzorg (1905 – 1942)

Pada akhir abad ke-19, Buitenzorg sesungguhnya telah menunjukkan karakter sebuah kota modern, ditandai dengan telah terbentuknya ruang-ruang kota yang memiliki fungsi pemerintahan, kegiatan ekonomi, pelayanan sosial dan kawasan

permukiman penduduk. Sejumlah bangunan penting dan fasilitas sosial telah dibangun disekitar Jalan Raya Pos, antara lain jalur kereta Buitenzorg- Batavia (1873), stasiun Buitenzorg (1881), polisi militer, garnisun, rumah sakit militer, kantor Asisten Residen (1870), pengadilan/*Landraad* (1875), sekolah, kantor pos, pasar, dan permukiman warga Eropa. Buitenzorg akhirnya berstatus *gemeente* tahun 1905 yang berarti kota yang memiliki otonomi sendiri. Pemimpin *gemeente* bergelar *burgemeester* (wali kota). Walikota pertama yaitu A. Bagchus, mulai memerintah kota pada tahun 1921-1927. Sebelum adanya walikota, urusan pemerintahan sementara dipegang oleh asisten residen yang kantornya berada di dekat istana. Bupati, pemimpin di pusat pemerintahan tradisional di selatan ibukota, pada periode ini tidak lagi memiliki wewenang dalam pemerintahan kota karena perannya telah digantikan oleh walikota.

Perpindahan pusat pemerintahan Buitenzorg dari selatan ke utara juga dialami oleh dua kabupaten lain di Jawa yaitu Bandung dan Malang (Yamani, 2018) dan (Permana, 2016). Perpindahan pusat kekuasaan tersebut terjadi setelah wilayahnya berstatus *gemeente*. Perpindahan ini dimungkinkan karena tiga faktor. Pertama, adanya perbedaan nilai dan budaya orang Eropa dan rakyat pribumi. Alun-alun Empang sejak abad ke-19 merupakan alun-alun resmi yang digunakan untuk pemerintah kolonial, pada perkembangan selanjutnya sudah dianggap tidak ideal lagi bagi kota modern karena terlalu melambangkan budaya pribumi. Kedua, semakin banyak warga Eropa yang datang untuk berwisata ke kebun raya atau bermukim di Buitenzorg. Ketiga, infrastruktur dan fasilitas di wilayah utara lebih lengkap sehingga memberi kenyamanan bagi warga Eropa. Dengan berstatus *gemeente*, pemerintah lebih mudah mewujudkan kota modern yang lebih bercorak Eropa dan meningkatkan wibawa kota yang modern, nyaman dan indah.

Setelah berpindahnya pusat pemerintahan kota Buitenzorg ke wilayah sekitar jalan raya pos, Alun-Alun Empang kehilangan fungsinya sebagai simbol kekuasaan kolonial. Meskipun demikian, rakyat pribumi lebih leluasa dalam memanfaatkan ruang alun-alun untuk aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Tataan ruang pada pusat pemerintahan tradisional ini masih dipertahankan hingga akhir pemerintahan kolonial (1942). Hal ini dapat terlihat di peta Buitenzorg tahun 1901, 1921 dan 1930. Sebagai warisan pusat pemerintahan kolonial abad ke-19, saat ini, Alun-Alun Empang tidak lagi utuh karena bangunan rumah bupati sudah tidak teridentifikasi lagi. Kini hanya tersisa tanah lapang berbentuk persegi dan masjid di bagian barat yang dikelilingi oleh permukiman padat penduduk dan bangunan komersial.

KESIMPULAN

Pusat pemerintahan tradisional Kampung Baru di Sukahati pada periode prakolonial masih menerapkan aspek kosmologi Jawa, hal ini terlihat pada orientasi rumah bupati dan elemen kolam yang membujur utara-selatan dengan sumbu imajiner ke arah laut di bagian atas dan ke arah Gunung Salak di bagian selatan. Pada periode ini belum terlihat dengan jelas adanya ruang terbuka berbentuk alun-alun

dengan konsep macapat seperti pada pemerintahan tradisional di Jawa pada umumnya. Setelah perencanaan ibukota Buitenzorg pada abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun alun-alun berbentuk persegi di depan kediaman bupati. Alun-alun tersebut menerapkan konsep *macapat*, dengan memposisikan alun-alun sebagai pusat di tengah, rumah bupati di selatan, masjid di barat dan pasar di utara. Selain berperan sebagai simbol kekuasaan kolonial dan tempat berkumpul rakyat, alun-alun juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, budaya dan keagaamaan akibat penerapan undang-undang *Wijkenstelsel* tahun 1835-1915. Setelah kota Buitenzorg berstatus sebagai *gemeente*, pusat kekuasaan kolonial dipindahkan ke utara yaitu di sekitar Istana dan jalan raya pos. Pola ruang pemerintahan tradisional di Bogor dengan alun-alun sebagai pusatnya masih dipertahankan hingga akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1942.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, spn. (2021). ***Tetap Lestari Empang Sumedang Menuju Kota Pusaka Heritage City***. <https://Sinarpaginews.Com>.
<https://sinarpaginews.com/wisata-9/43200/tetap-lestari-empang-sumedang-menuju-kota-pusaka--heritage-city-.html%0Asinarpaginews.com>
- Bachtiar, T. (2020). ***Balong Gede dan Situ yang Hilang***.
 Www.Ayobandung.Com. <https://www.ayobandung.com/netizen/pr-79703471/balong-gede-dan-situ-yang-hilang>
- Breman, J. (2014). ***Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870***. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=-QpeDAAAQBAJ>
- Danasasmita, S. (2022). ***Mencari Gerbang Pakuan***. Kiblat Buku Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=irlbEAAAQBAJ>
- de Haan, F. (1912). ***Priangan: de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811*** (Issue pt. 4). Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
<https://books.google.co.id/books?id=BRRXAAAAMAAJ>
- Falah, M., Yuniadi, A., & Adyawardhina, R. (2019). Pergeseran Makna Filosofis Alun-Alun Kota Bandung Pada Abad Xix – Abad Xxi. ***Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya***, 11(2), 203.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i2.507>
- Handinoto. (1992). Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu Dan Sekarang. ***Dimensi Teknik Arsitektur***, 18(1), 1–15.
- Hardjasaputra, A. S., Darsa, U. A., van zanten, W., & Rosidi, A. (2022). ***Bupati di Priangan: Sundalana 3***. Pusat Studi Sunda \& Kiblat Buku Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=2sRsEAAAQBAJ>
- Indrianingrum, L., Nur Azizah, A., Eko Prasetyo, G., & Hidayah, N. (2015). Pergeseran Peran Dan Fungsi Alun-Alun Kaliwungu Sebagai Ruang Terbuka Publik. ***Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan***, 17(1), 17–24.
- Lasmiyati, L. (2015). Kopi Di Priangan Abad Xviii-Xix. ***Patanjala : Jurnal***

- Penelitian Sejarah Dan Budaya***, 7(2), 217.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i2.94>
- Permana, R. W. (2016). ***Kisah munculnya dua alun-alun di kota Malang***. Merdeka.Com. <https://m.merdeka.com/malang/pariwisata/kisah-munculya-dua-alun-alun-di-kota-malang-1604120.html>
- Santoso, J. (2008). ***Arsitektur-kota Jawa: kosmos, kultur \& kuasa***. Centropolis, Magister Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanegara. <https://books.google.co.id/books?id=GuMOAQAAMAAJ>
- Thresnawaty, E. (2011). Sejarah Kerajaan Sumedang Larang. In ***Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*** (Vol. 3, Issue 1, p. 154). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i1.276>
- Wihardyanto, D., & Ikaputra, I. (2019). Pembangunan Permukiman Kolonial Belanda Di Jawa : Sebuah Tinjauan Teori. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 6(2), 146. <https://doi.org/10.24252/nature.v6i2a5>
- Yamani, Z. (2018). ***Bandung, Kota dengan Wajah Kolonialisme***. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/bandung-si-kota-kembang-dengan-wajah-kolonialisme/a-44565819>